

ANALISA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN PELABUHAN TEGAL



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:
LAILATUL CHOMISAH
NPM. 5119500254

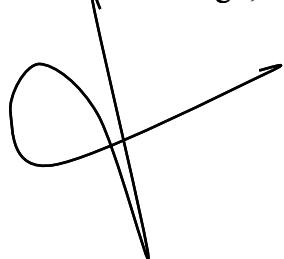
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2022

**ANALISA KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN
PELABUHAN TEGAL**

**LAILATUL CHOMISAH
NPM. 5119500254**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

Tegal, Juli 2022
Pembimbing II,



Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H.
NIDN. 0619058703

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik/Ketua Program Studi



Kanti Rahayu, S.H., M.H.
NIDN. 0620108203

**ANALISA KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN
PELABUHAN TEGAL**

**LAILATUL CHOMISAH
NPM. 5119500254**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh:

Tegal, Juli 2022

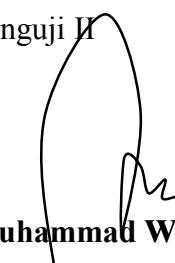
Penguji I



H. Toni Haryadi, S.H., M.H.

NIDN. 0020045801

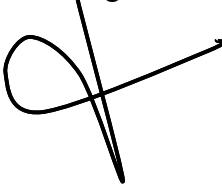
Penguji II



Muhammad Wildan, S.H., M.H.

NIDN. 0627108802

Pembimbing I



Imam Asmarudin, S.H., M.H

NIDN. 0625058106

Pembimbing II



Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H

NIDN. 0619058703

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal,



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Chomisah
NPM : 5119500254
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 24 Juli 1980
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **ANALISA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN PELABUHAN TEGAL**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, Mei 2022

Yang menyatakan



(Lailatul Chomisah)

Abstrak

Pengembangan pelabuhan dapat memajukan ekonomi di suatu daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran secara tegas membolehkan keterlibatan pemerintah daerah untuk mengelola pelabuhan. Tegal sangat dikenal dengan pelabuhannya yang strategis.

Penelitian ini bertujuan: (1). Untuk mendeskripsikan pengaturan pengelolaan pelabuhan laut berdasarkan hukum di Indonesia. (2). Untuk mengkaji kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan Pelabuhan Tegal.

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online* serta dianalisa dengan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah pelabuhan hanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sedangkan secara khusus diatur oleh peraturan setingkat peraturan pemerintah. Pengelolaan pelabuhan berkaitan erat dengan berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pabean, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Karantina Perikanan, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan berbagai undang-undang lainnya. Pengaturan kewenangan pengelolaan pelabuhan laut secara teknis diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka pengelolaan pelabuhan tidak lagi mutlak diusahakan hanya oleh PT. Pelindo, tetapi juga bisa diusahakan oleh operator lain termasuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut berakibat kewenangan pemerintah daerah hanya memperoleh pelimpahan lokal. Dalam hal ini berarti Pemerintah Kota Tegal hanya memperoleh kewenangan penyelenggaraan pelabuhan pengumpulan lokal saja.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Kewenangan, Pelabuhan, Pengelolaan

Abstract

Port development can advance the economy in an area. The Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping explicitly allows the involvement of local governments to manage ports. Tegal is well known for its strategic port.

This research aims: (1). To describe seaport management arrangements based on Indonesian law. (2). To review the authority of the local government on the management of the Tegal Port.

This type of research is library research. The approach used is a normative approach. The data collection technique is through conventional and online literature searches and analyzed with qualitative data analysis because the data will be presented in a narrative-descriptive manner, not in the form of numbers or numeric.

The results of this study indicate that port problems are only regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping while specifically regulated by regulations at the level of government regulations. Port management is closely related to various laws, such as the Fisheries Law, Regional Government Law, Customs Law, Environmental Law, Fishery Quarantine Law, Central and Regional Financial Balance Law and various laws. other laws. The regulation of the authority to manage seaports is technically regulated by the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 57 of 2020 concerning the Operation of Seaports. Since the enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping, port management is no longer absolutely managed by PT. Pelindo, but can also be operated by other operators including the Provincial Government and Regency/City Regional Governments. Based on the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 57 of 2020 concerning the Operation of Sea Ports, the authority of local governments only gets local delegation. In this case, it means that the Tegal City Government only has the authority to operate a local feeder port.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: Authority, Port, Management

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Persembahan buat Ayahanda (semoga Allah berikan surga yang indah, aamiin).
2. Teruntuk Ibu, Anak dan semua The Big Family (sehat selalu, panjang usia, selamat dunia akhirat, aamiin).
3. Semua dosen tanpa terkecuali terimakasih atas ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Dunia tempat berjuang, istirahat itu di surga”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT., Alhamdulillah penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan Skripsi ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW., yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Tony Haryadi, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
6. Muhammad Wildan, S.H., M.H. (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).

7. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT. sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT. membala semuam amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	19
A. Kewenangan.....	19
B. Pemerintah	26
C. Pengertian Dan Jenis Pelabuhan	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan Pengelolaan Pelabuhan Laut Berdasarkan Hukum Di	

Indonesia	46
B. Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Pelabuhan Tegal	63
BAB IV PENUTUP	83
A. Simpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85